

# The Manager Review

## Jurnal Ilmiah Manajemen

DJI Vs IHSG? Sebuah Analisis Dampak Terjadinya Krisis Global

*Berto Usman*

Deskripsi Pelaksanaan Delapan Prinsip Manajemen Mutu Dalam Penerapan ISO 9001:2008 Pada PT. Ottopaint Colours Indonesia Tangerang Selatan

*Karona Cahya Susena  
Witman Rasyid  
Sugeng Susetyo*

Persepsi, Sikap, dan Perilaku Pegawai Terhadap Pelaksanaan Program e-KTP Di Kantor Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (Study Deskriptif Kualitatif)

*Yogi Martha Kesuma  
Fahrudin JS Pareke  
Nasution*

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang (*Studi Deskriptif Kualitatif*)

*Revan Hardiawan  
Kamaludin  
Nasution*

Kepuasan Kerja Karyawan Bank Bengkulu Cabang Utama

*Hery Susetyo  
Witman Rasyid  
Sugeng Susetyo*

Peran Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemeditasi Dalam Pengaruh Insentif Dengan Prestasi Kerja

*Rika Andriani Putri  
Fahrudin JS Pareke  
Sularsih Anggarawati*

Studi Implementasi *Learning Performance Index* Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu

*Yusdi Ilham Yuniardi  
Handoko Hadiyanto  
Trisna Murni*

Implementasi *Standard Operation Procedures* (SOP) Pelayanan Perkara

*Apriska Maghlianda  
Witman Rasyid  
Sugeng Susetyo*

Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Antara Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional Yang Sebanding Di Indonesia Dengan Menggunakan Rasio Camels

*M. Zaenal Muttaqin  
Kamaludin  
Sri Adji Prabawa*



# The Manager Review

Jurnal Ilmiah Manajemen



Volume 13, Nomor 1, Oktober 2012

## DAFTAR ISI

DJI Vs IHSG? Sebuah Analisis Dampak Terjadinya Krisis Global <i>Berto Usman</i>	1 - 14
Deskripsi Pelaksanaan Delapan Prinsip Manajemen Mutu Dalam Penerapan ISO 9001:2008 Pada PT. Ottopaint Colours Indonesia Tangerang Selatan <i>Karona Cahya Susena</i> <i>Witman Rasyid</i> <i>Sugeng Susetyo</i>	15 - 25
Persepsi, Sikap, dan Perilaku Pegawai Terhadap Pelaksanaan Program e-KTP Di Kantor Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (Study Deskriptif Kualitatif) <i>Yogi Martha Kesuma</i> <i>Fahrudin JS Pareke</i> <i>Nasution</i>	26 - 37
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang (Studi Deskriptif Kualitatif) <i>Revan Hardiawan</i> <i>Kamaludin</i> <i>Nasution</i>	38 - 50
Kepuasan Kerja Karyawan Bank Bengkulu Cabang Utama <i>Hery Susetyo</i> <i>Witman Rasyid</i> <i>Sugeng Susetyo</i>	51 - 61
Peran Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemediasi Dalam Pengaruh Insentif Dengan Prestasi Kerja <i>Rika Andriani Putri</i> <i>Fahrudin JS Pareke</i> <i>Sularsih Anggarawati</i>	62 - 74
Studi Implementasi <i>Learning Performance Index</i> Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu <i>Yusdi Ilham Yuniardi</i> <i>Handoko Hadiyanto</i> <i>Trisna Murni</i>	75 - 83

## DAFTAR ISI

Implementasi <i>Standard Operation Procedures</i> (SOP) Pelayanan Perkara <i>Apriska Maghlianda</i> <i>Witman Rasyid</i> <i>Sugeng Susetyo</i>	84 - 94
Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Antara Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional Yang Sebanding Di Indonesia Dengan Menggunakan Rasio Camels <i>M. Zaenal Muttaqin</i> <i>Kamaludin</i> <i>Sri Adji Prabawa</i>	95 - 107

# Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang (Studi Deskriptif Kualitatif)

Revan Hardiawan  
Kamaludin dan Nasution

Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Manajemen  
Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu  
Jalan Raya Kandang Limun, Bengkulu 38371A

## ABSTRACT

*The aim of this study is to describe the implementation of SIMDA version 2.1 at Bappeda Office Kepahiang Regency based on the employee's perception and attitude. To answer the research questions, researcher use a qualitative descriptive approach with in depth interview and documentation study methods. The samples used in this study consist of 11 respondents who work as employee at Bappeda Office at Kepahiang Regency. The results show that there is a negative perception from the employees upon the implementation of SIMDA version 2.1, however, in general the employees support the implementation of the application. The preparation of the implementation which have been done are less adequate which become as challenging factors to the implementer. The effort to increase the human resource capacity and to increase the infrastructure are also needed to take into point in order to achieve the same perception from the employees and maintaining the employees' positive attitude.*

**Keywords:** Perception, Attitude, Preparation, The challenging and supporting factors, employees.

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari keterpaduan dan sinergisitas seluruh elemen perangkat daerah yang ada di dalamnya. Dukungan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh pihak pemerintah pusat ke pemerintah daerah pun menjadi faktor penting keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Salah satu langkah pendukung yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah memberikan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang No. 12 Tahun 2008 maka berbagai kelemahan dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran pembangunan daerah diharapkan dapat disempurnakan.

Kewenangan yang dimiliki daerah menjadikannya dapat menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Perencanaan pembangunan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Anggaran pembangunan yang disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan daerah tentu akan lebih efektif dibandingkan dengan anggaran pembangunan yang disusun dengan prinsip keseragaman antar daerah. Anggaran pembangunan tersebut diharapkan dapat mengatasi terjadinya pemborosan sebagai akibat program pembangunan yang tumpang tindih.

Keleluasaan pemerintah daerah tetap berada dalam lingkup pengawasan pemerintah pusat, melalui Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan kedua undang - undang tersebut maka Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government*

dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu, pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan, serta dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif, meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal ini memberikan respon positif dengan mengembangkan sebuah Program Aplikasi Komputer SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) versi 2.1. Program aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP guna membantu pengelolaan keuangan daerah. Adanya program aplikasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah saat ini dituntut untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akuntabilitas dan transparan. Diharapkan dengan adanya aplikasi SIMDA, disertai dengan pembelajaran terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengukur kinerjanya sendiri.

Sosialisasi mengenai SIMDA Versi 2.1 di Kabupaten Kepahiang telah dimulai sejak tahun 2009, diawali dengan memperkenalkan aplikasi tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang dan pada tahun – tahun berikutnya aplikasi ini diperkenalkan ke seluruh SKPD di Kabupaten Kepahiang melalui pelatihan – pelatihan.

Pemahaman dan penguasaan aplikasi menjadi kendala tersendiri di daerah, khususnya di Kabupaten Kepahiang. Proses “*transfer of knowledge*” setidaknya memerlukan perhatian dan keseriusan dari kedua belah pihak, dalam hal ini BPKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

Penerapan SIMDA sebagai salah satu instrument untuk menuju *Good Governance* dan *e-Governance*, menuntut suatu daerah untuk memiliki sumber daya manusia yang cakap karena “Kegagalan dalam mengelola sumber daya manusia dapat mengakibatkan timbulnya gangguan dalam pencapaian-pencapaian tujuan organisasi, baik terhadap performance, profit, maupun kelangsungan hidup organisasi itu sendiri” (Mar’at, 1996).

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, maka pokok masalah yang akan diambil dalam penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimanakah implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Versi 2.1 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang melalui persepsi dan sikap pegawai terhadap implementasi SIMDA versi 2.1, persiapan serta faktor penghambat/pendukungnya?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Versi 2.1 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang.

### **Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat, yaitu:

- Memberikan kontribusi pemikiran kepada pejabat dan seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Kepahiang tentang implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Versi 2.1 dari beberapa sudut pandang yang selanjutnya dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka persiapan implementasi aplikasi ini ke depannya.

- Bermanfaat bagi peneliti sendiri dan bagi rekan-rekan sesama peneliti, akan menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam bidang Sumber Daya Manusia yang selanjutnya dapat dilakukan penelitian dengan variabel atau sudut pandang yang berbeda.

### **Persepsi**

Thoha (2002) persepsi didefinisikan sebagai kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman selanjutnya menurut Schiffman & Kanuk (2007) persepsi adalah suatu proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan, dan mengartikan masukan informasi yang diterima menjadi suatu gambaran yang penuh arti dan saling terkait.

Apabila dikaji lebih lanjut definisi persepsi menurut para ahli di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai ciri – ciri persepsi sebagai berikut:

- a. Persepsi merupakan cara pandang/ sudut pandang. Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulus masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi (Atkinson dan Hilgard, 1993).
- b. Adanya stimulus (input), pengorganisasian stimulus dan penterjemahan atau penafsiran stimulus.
- c. Adanya pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan – hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan.
- d. Adanya proses pemberian arti terhadap lingkungan seorang individu.

Salah satu alasan mengapa persepsi demikian penting dalam hal menafsirkan dunia disekeliling kita adalah bahwa diri masing – masing orang memiliki persepsi sendiri tetapi persepsi keluar dengan cara yang berbeda sesuai dengan situasi yang ideal. Persepsi merupakan sebuah proses yang hampir bersifat otomatis dan persepsi bekerja dengan cara yang hampir serupa pada setiap masing – masing individu. Sekalipun demikian, persepsi secara tipikal menghasilkan persepsi yang berbeda – beda.

Menurut Myers & Klein (2011), proses persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu obyek psikologis dengan kacamata sendiri yang diwarnai oleh nilai dari pribadinya. Sedangkan obyek psikologis ini dapat berupa kejadian, ide atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap obyek psikologik tersebut. Melalui komponen kognisi ini akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihat. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki pribadi seseorang akan terjadi keyakinan terhadap obyek tersebut. Selanjutnya komponen afeksi memberikan evaluasi emosional (senang atau tidak senang) terhadap objek.

### **Sikap**

Sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Newcomb salah seorang ahli psikologi sosial menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksana motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan ‘pre-disposisi’ tindakan atau perilaku. Sikap itu masih merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka tingkah laku terbuka. Lebih dapat dijelaskan lagi bahwa sikap merupakan reaksi terhadap objek dilingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek. Sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yakni :

- a. Menerima (*receiving*)  
Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperlihatkan stimulus yang diberikan (objek)
- b. Merespons (*responding*)  
Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, lepas pekerjaan itu benar atau salah, berarti orang yang menerima ide tersebut.
- c. Menghargai (*valuing*)  
Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap ketiga.
- d. Bertanggung jawab (*responsible*)  
Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang paling tinggi.

Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung dapat ditanyakan bagaimana pendapat atau pertanyaan responden terhadap suatu objek. Sedangkan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan pertanyaan – pertanyaan hipotesis, kemudian ditanyakan pendapat responden dan biasanya jawaban berada dalam rentang antara sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju.

Menurut Sobur (2003), ciri khas sikap adalah mempunyai objek tertentu, contohnya orang, perilaku, konsep, situasi, benda dan sebagainya serta mengandung penilaian berupa suka – tidak suka, setuju – tidak setuju.

### **Sistem Informasi Manajemen (SIM)**

Peranan informasi dalam suatu organisasi dan manajemen tidak perlu lagi diragukan. Informasi kini memegang peranan yang sangat dominan dalam satu pengolahan, pendistribusian, penyimpanan dan penemuan kembali informasi perusahaan/organisasi. Bahkan dapat dikatakan siapa yang memiliki dan menguasai informasi yang lengkap secara nasional, internasional/global, mereka/organisasi itulah yang terkaya di dunia. Tanpa ada informasi, para manajer, staf/karyawan dan anggota – anggota organisasi yang lainnya tidak dapat mengambil keputusan yang efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Untuk dapat menghubungkan satu unit informasi dengan unit – unit informasi lainnya menuju satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, pembentukan sistem informasi yang akurat sangat diperlukan karena apabila satu unit macet/terganggu maka unit lainnya pun akan terganggu.

Menurut Gaol (2008), sistem informasi yang selain melakukan pengolahan transaksi yang sangat berguna untuk kepentingan organisasi, juga banyak memberikan dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan disebut Sistem Informasi Manajemen (SIM). Dalam hal ini Chr. Jimmy L. Gaol berasumsi bahwa organisasi dalam segala motif selalu membutuhkan sistem – sistem untuk mengklasifikasi, mengolah, menyimpan, melihat kembali/ menemukan kembali dan mendistribusikan informasi. Sedangkan menurut Gordon B. Davis dalam Gaol (2008), Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sebuah kesatuan, sistem mesin pengguna yang terintegrasi dalam memberikan informasi untuk mendukung operasi, manajemen dan fungsi pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem yang dimaksud adalah sistem yang menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak computer, prosedur manual, model yang digunakan untuk menganalisis, merencanakan, mengendalikan dan membuat keputusan serta sebuah basis data.

Salah satu bentuk organisasi yang memerlukan pengelolaan informasi yang baik dan akurat adalah pemerintah di suatu daerah. Dalam lingkup pemerintah daerah terdapat informasi – informasi penting yang harus dikelola dengan baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik dan bisa mewujudkan visi misi daerahnya. Satu hal yang sering menjadi sorotan publik/masyarakat adalah sisi efisiensi dan transparansi penggunaan serta penyusunan laporan keuangannya. Sesuai dengan peraturan perundang – undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), yaitu system yang mampu mengolah data – data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang disusun oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai badan pengawas yang membina pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

### **SIMDA Versi 2.1**

SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah adalah suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja, penatausahaan perbendaharaan, penatausahaan Kas Daerah dan akuntansi pengelolaan keuangan secara otomatis dengan memanfaatkan pengolahan data elektronik.

Maksud dari pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku. Beranjak dari maksud tersebut, maka tujuan akhir dari SIMDA adalah mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya & penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi, khususnya. Sesuai dengan tujuannya, penerapan SIMDA ini ditujukan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum mampu menyelenggarakan proses penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik sesuai dengan peraturan akuntansi pemerintah yang berlaku. Penerapan dari SIMDA itu sendiri merupakan pilihan bagi masing-masing Pemerintah Daerah.

SIMDA Ver. 2.1 sendiri merupakan sistem informasi versi paling *update* yang telah berhasil dikembangkan oleh BPKP akibat adanya perubahan acuan peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai diaplikasikan sejak tahun 2006 dan sampai sekarang masih digunakan dengan beberapa penyempurnaan, misalnya dengan adanya perubahan ketentuan pedoman pengelolaan keuangan daerah melalui Permendagri No. 59 Tahun 2007 mengenai Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006.



## Kerangka Analisis

### Gambar 1. Kerangka Analisis

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bappeda Kabupaten Kepahiang dan penulis adalah salah seorang pegawai di kantor tersebut serta merupakan bagian dari subjek penelitian. Penelitian yang melibatkan peneliti secara langsung berproses dan melebur menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan subjek dan latar belakang yang akan diteliti berupa laporan yang sebenar – benarnya, apa adanya dan catatan – catatan lapangan yang aktual adalah merupakan penelitian kualitatif (Denzin dan Lincoln, 1994) dalam Herdiansyah (2010).

Masih dalam Herdiansyah (2010), menurut Creswell (1998), penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah – masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi serta dilakukan *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti. Gambaran mengenai masalah sosial yang dialami subjek penelitian dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian bisa didapatkan oleh peneliti dengan memperoleh informasi dari beberapa sudut pandang subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya (Soeratno, 2003).

Menurut Sekaran (2009), apabila studi yang dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi sekaligus memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau menggambarkan aspek – aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri atau yang lainnya maka studi ini merupakan studi deskriptif.

### Defenisi Operasional

#### Persepsi

Persepsi adalah rangkaian proses kognisi atau pengenalan dan evaluasi emosional pegawai negeri sipil (pejabat/staf) di Bappeda Kabupaten Kepahiang yang memungkinkan mereka untuk menafsirkan dan memahami tentang pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1

### **Sikap**

Sikap adalah tindakan dalam bentuk respon setuju atau tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung ataupun respon positif atau negatif dari pegawai negeri sipil (pejabat/staf) berkenaan dengan pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang.

### **Persiapan**

Persiapan adalah proses menuju kesiapan implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang, meliputi hal – hal sebagai berikut:

- Penyediaan software aplikasi, komputer dan perlengkapannya beserta jaringannya (*Local Area Network*)
- Kompetensi sumber daya manusia dalam rangka implementasi SIMDA versi 2.1
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengenai SIMDA versi 2.1
- Kerjasama antar pegawai dalam implementasi SIMDA versi 2.1

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor pendukung dan penghambat adalah segala sesuatu yang berbentuk benda atau bukan benda yang ditemukan selama implementasi SIMDA versi 2.1 sehingga menjadikan proses penerapan aplikasi tersebut lancar/tidak lancar, terganggu/tidak terganggu atau pun berjalan/tidak berjalan sebagaimana mestinya.

### **Metode Pengambilan Sampel**

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang, maka populasi penelitian disini adalah seluruh pegawai yang berada di Bappeda Kabupaten Kepahiang. Agar dapat menampilkan dan menyajikan serangkaian perspektif guna menggambarkan kompleksitas dari apa yang diteliti, maka tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Non-probability Sampling* dengan tehnik *Purposeful Sampling* (Herdiansyah, 2010). Dalam *purposeful sampling*, masih menurut Herdiansyah (2010), peneliti memilih subjek penelitian dan lokasi penelitian dengan tujuan untuk mempelajari atau untuk memahami permasalahan pokok yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menentukan subjek penelitian yaitu pegawai negeri sipil Bappeda Kabupaten Kepahiang dengan kriteria sebagai berikut:

1. Beberapa pejabat (eselon) di Bappeda Kabupaten Kepahiang yang mengetahui/sering menggunakan aplikasi SIMDA versi 2.1.
2. Operator SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang
3. Bendahara pengeluaran Bappeda Kabupaten Kepahiang.

Karyawan/ Bendahara Pengeluaran Pembantu yang aktif sebagai pengguna aplikasi SIMDA versi 2.1.

### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut antara lain wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis akan menghimpun dan memperoleh data/informasi yang tepat dan akurat dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara  
Menurut Miles & Huberman (1994), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dapat juga diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan motif dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan

dengan kondisi satu orang melakukan/memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan.

Menurut Nasution (2003), wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden (Soeratno dan Arsyad, 2003). Sedangkan Padmowati (2004) mendefinisikan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.

## 2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen – dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2009).

## Metode Analisis

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif ini bersifat siklus yang dilakukan sewaktu peneliti berada di lapangan maupun setelah meninggalkan lapangan penelitian. Untuk menyajikan data agar lebih bermakna dan mudah dipahami, ada tiga alur kegiatan proses analisis yang dilakukan peneliti secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles dan Huberman, 1992).

## HASIL PENELITIAN

### Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Kepahiang

Bappeda merupakan salah satu bagian dari Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Kepahiang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005. Per April 2011, keseluruhan pegawai di Bappeda Kabupaten Kepahiang sebanyak 45 orang (PNS/CPNS).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang dan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang, maka dapat disebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Kepahiang mengemban tugas yaitu : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pernyataan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang adalah: ***“Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai perancang pembangunan daerah yang terpercaya, aspiratif dan berbasis sumber daya yang berkualitas serta berfungsi sebagai lokomotif pembangunan yang akurat”.***

## **Struktur Organisasi**

### **Gambar 2. Struktur Organisasi**

#### **Karakteristik Responden**

Responden yang dipilih dalam penelitian ini sebanyak 11 orang dengan beberapa kualifikasi antara lain Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan karyawan/staf di Bappeda Kabupaten Kepahiang. Wawancara dilakukan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang pada saat jam kerja. Wawancara dan observasi dokumentasi dilakukan peneliti selama 2 bulan, yaitu dari bulan April – Mei 2012.

#### **Deskripsi Hasil Penelitian Persepsi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di Bappeda Kabupaten Kepahiang, untuk indikator pertama yaitu pandangan pegawai terhadap implementasi SIMDA versi 2.1, secara umum dapat disimpulkan bahwa terkait dengan implementasi kebijakan penggunaan aplikasi SIMDA versi 2.1 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, khususnya di Bappeda, para pejabat/atasan memiliki kesamaan persepsi. Karyawan/staf memberikan pandangan bahwa dalam implementasi SIMDA versi 2.1 secara teknis di lapangan mereka tidak mengetahui keseluruhan langkah – langkah penggunaan aplikasi SIMDA versi 2.1 secara umum begitupun dengan pemahaman terhadap menu – menu program yang ada di dalam aplikasi SIMDA versi 2.1. Dua dari 5 (lima) orang responden yang merupakan karyawan/staf menyatakan pernah ikut pelatihan aplikasi SIMDA versi 2.1 namun hanya sekedar mengetahui langkah – langkah secara umum dari penganggaran sampai dengan pelaporan namun tidak memahami keseluruhan penggunaan menu – menu program yang ada di aplikasi SIMDA versi 2.1. Dua orang berikutnya menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA versi 2.1 dan mendapatkan pengetahuan tentang SIMDA versi 2.1 hanya dari berkonsultasi dan belajar sendiri dan sampai saat ini hanya memahami proses penganggaran saja. Satu orang lagi

juga menyatakan belum pernah ikut pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA versi 2.1 dan hanya memahami sebagian kecil dari bagian penatausahaan saja.

Selanjutnya mengenai pandangan pegawai secara umum terhadap implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang memberikan beberapa sisi pandangan, ada beberapa orang pejabat/atasan memberikan pandangan positif terhadap hal tersebut, dalam artian bahwa secara umum implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang sudah baik dalam pelaksanaannya walaupun diantara pejabat/atasan yang berpandangan positif ini juga menambahkan beberapa kekurangan di dalam kondisi baik tersebut, seperti masih kurangnya sarana prasarana pendukung dan pemahaman sumber daya manusia (SDM) terhadap aplikasi ini yang masih dinilai kurang. Beberapa orang pejabat/atasan dan karyawan/staf memberikan pandangan negatif terhadap implementasi SIMDA versi 2.1 secara umum di Bappeda Kabupaten Kepahiang, dengan kata lain pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang dipandang belum maksimal dan masih sedikit rumit dengan menyebutkan penyebabnya antara lain adalah kompetensi SDM dan kurangnya dukungan sarana prasarana dari Bappeda itu sendiri. Sedikit berbeda, beberapa orang staf mengatakan bahwa implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang hanya berjalan sebagaimana mestinya atau apa adanya saja. Mereka memberikan pandangan bahwa implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang hanya sekedar pelaksanaan dari kebijakan atasan dan bukan pelaksanaan program perubahan, namun tetap merasa bahwa SIMDA versi 2.1 bisa membantu pekerjaannya.

### **Sikap**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang pejabat dan karyawan Bappeda tentang sikap pegawai terhadap implementasi SIMDA versi 2.1, dengan indikator yang pertama identifikasi pegawai terhadap implementasi SIMDA versi 2.1, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pegawai Bappeda mendukung pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1.

### **Persiapan**

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang telah dilakukan persiapan sumber daya manusia (SDM) berupa kegiatan sosialisasi terhadap SIMDA versi 2.1 sekaligus bimbingan teknis aplikasi SIMDA versi 2.1. Selain pernyataan di atas, ada responden yang memberikan pernyataan tambahan mengenai persiapan SDM ini, diantaranya bahwa sosialisasi dan bimtek tersebut tidak khusus bagi Bappeda Kabupaten Kepahiang tetapi juga mengundang personil dari SKPD lainnya. SDM dari Bappeda pun hanya beberapa orang saja dan ada responden yang mengatakan bahwa SDM yang pernah mengikuti ini pun ada beberapa orang yang tidak bertugas lagi di Bappeda Kabupaten Kepahiang.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh karyawan/staf pernah menemukan penghambat atau kendala dalam pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1.

Selanjutnya, semua responden juga menyatakan masih memerlukan pihak luar, oleh penulis dicontohkan BPKP, untuk membantu dan membimbing pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang. Beberapa responden juga mencontohkan secara langsung bentuk bantuan atau bimbingan yang mereka inginkan, seperti bimbingan teknis atau pelatihan secara berkala (3 bulan x 1 kali) oleh pihak BPKP. Mengenai faktor pendukung dalam implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang, dari 5 (lima) orang responden, 3 (tiga) orang responden menyatakan di dukung oleh atasannya dengan diberikan fasilitas seperti laptop bahkan ada yang diberikan honorarium sebagai Operator SIMDA namun 2 (dua) orang menyatakan bahwa faktor pendukung bagi mereka adalah keingintahuan dan motivasi mereka untuk mendalami aplikasi SIMDA versi 2.1.

## **Pembahasan**

### **Persepsi**

Secara umum, pejabat/atasan di Bappeda Kabupaten Kepahiang mempersepsikan bahwa SIMDA versi 2.1 telah dilaksanakan dengan baik, yang berarti keinginan untuk memiliki sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), sistem yang mampu mengolah data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan, serta dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif, meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah, sesuai dengan tujuan utama dalam penerapan aplikasi ini, sudah terwujud.

Apabila persepsi atasan mengenai implementasi SIMDA versi 2.1 dianggap sebagai pandangan positif maka persepsi staf mengenai implementasi SIMDA versi 2.1 ini bisa dianggap sebagai pandangan negatif. Secara umum, karyawan/staf Bappeda Kabupaten Kepahiang berpandangan bahwa implementasi SIMDA versi 2.1 belum maksimal, bahkan ada pandangan bahwa implementasi aplikasi ini hanya sebatas menunaikan perintah dari atasan saja. Beberapa karyawan dan staf pun menyatakan belum pernah diikutkan sertakan dalam pelatihan atau bimbingan teknis mengenai SIMDA versi 2.1.

Menurut Alport (dalam Mar'at, 1991) bahwa proses persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu. Dari informasi di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa persepsi negatif karyawan/staf timbul karena faktor kurangnya pengetahuan individu akan aplikasi SIMDA versi 2.1 yang selama ini mereka gunakan.

### **Sikap**

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pegawai Bappeda Kabupaten Kepahiang memiliki tanggapan yang sama yaitu mendukung pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1 dan pernyataan dukungan ini disertai berbagai alasan. Menurut Kreitner dan Kinicki (2005), bahwa sikap sebagai kecenderungan merespons sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu dan Azwar (2007) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu. Walaupun sebelumnya persepsi negatif terhadap aplikasi SIMDA versi 2.1 muncul dari karyawan/staf, namun untuk respon penggunaan aplikasi ini ke depannya, pegawai Bappeda Kabupaten Kepahiang menyatakan sikap mendukung implementasi SIMDA versi 2.1. Pengaruh orang lain yang dianggap penting berperan dipernyataan sikap ini. Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah menjadi kewajiban untuk patuh kepada perintah atasan sehingga menjadikan kewajiban ini sebagai motivasi dalam mensukseskan kebijakan implementasi SIMDA versi 2.1.

### **Persiapan**

Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada pejabat/atasan Bappeda tentang persiapan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan implementasi SIMDA versi 2.1 di kantor Bappeda sendiri dengan indikator persiapan sumber daya manusia, maka dapat dilihat bahwa persiapan yang pernah dilakukan yaitu berupa sosialisasi dan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan pada tahun 2009. JB Kristiadi dalam Padmowati (2004) menyebutkan bahwa pelaksanaan sistem pelatihan akan sangat menunjang pencapaian tujuan organisasi. Namun berdasarkan penjabaran persiapan yang pernah dilakukan, peneliti menanyakan persiapan SDM tentang pemahaman PNS Bappeda Kabupaten Kepahiang untuk melaksanakan implementasi SIMDA versi 2.1 kepada pejabat/atasan, maka dapat disimpulkan bahwa pejabat/atasan Bappeda memiliki pandangan bahwa PNS Bappeda Kabupaten Kepahiang belum memiliki pemahaman yang cukup dalam melaksanakan implementasi SIMDA versi 2.1 ini. Pelatihan yang

telah dilaksanakan, bagi personil pelaksana (karyawan/staf) dirasakan belum mencukupi kebutuhan informasi mengenai SIMDA versi 2.1.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada staf/karyawan Bappeda Kabupaten Kepahiang maka dapat disimpulkan bahwa kendala atau faktor penghambat ditemui oleh semua pegawai Bappeda Kabupaten Kepahiang dalam pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1. Berbagai macam kendala yang muncul, berdasarkan hasil wawancara, pada umumnya disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pemahaman karyawan/staf dan beberapa orang dari karyawan/staf menambahkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana pendukung juga menjadi penyebab munculnya masalah tersebut. Menurut Padowati (2004) bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang diperlukan dalam rangka implementasi SIMDA dan Mar'at (1996) menyatakan bahwa faktor informasi merupakan faktor yang paling dominan dalam pelaksanaan *good governance*. Berdasarkan pernyataan – pernyataan di atas, proses penyampaian pengetahuan sangat dibutuhkan untuk mendukung implementasi aplikasi SIMDA versi 2.1. Pendidikan dan pelatihan dijadikan sarana dalam menyampaikan segala sesuatu informasi mengenai perkembangan aplikasi SIMDA sehingga pembentukan personil yang terampil dalam pelaksanaan Sistem Akutansi yang menghasilkan Laporan Keuangan secara wajar, transparan dan akuntabel dapat terwujud di setiap pemerintah daerah, khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Secara umum antara pejabat/atasan dengan karyawan/staf Bappeda Kabupaten Kepahiang, memiliki perbedaan persepsi dalam memandang pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1 yang disebabkan oleh perbedaan wewenang dalam struktur organisasi dan secara umum sikap pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang ialah mendukung pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1 dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk mensukseskan implementasi SIMDA versi 2.1 di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kepahiang secara keseluruhan, telah dilaksanakan persiapan implementasi SIMDA versi 2.1, khususnya di Bappeda Kabupaten Kepahiang melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis serta Dalam pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang masih banyak ditemukan kendala – kendala teknis yang disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman dan kemampuan teknis SDM pelaksananya dan faktor pendukung, seperti penyediaan sarana prasarana kerja dan peningkatan motivasi pegawai, semaksimal mungkin terus diusahakan guna mendukung kesuksesan implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang.

### **Saran**

SIMDA versi 2.1 diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan yang dapat diandalkan dan sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karena itu beberapa pembenahan berupa sarana dan prasarana pendukung, pelatihan atau bimbingan teknis bagi SDM pelaksana secara berkala seharusnya menjadi prioritas kegiatan bagi Bappeda Kabupaten Kepahiang

## **DAFTAR PUSTAKA**

Atkinson, R. L, Atkinson, R. C & Hilgard, E. R. (1993). Pengantar Psikologi. Alih Bahasa: Nurjanah Taufiq. Jakarta: PT. Erlangga.

Azwar, S. (2007). Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Edisi Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia. (2010).
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Gaol, Chr. Jimmy L. (2008). *Sistem Informasi Manajemen Pemahaman dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Herdiansyah, H. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif, Seni dan Memahami Fenomena Sosial*. Yogyakarta: Greentea Publishing.
- Kreitner, R., & Kinicki, A. (2005). *Perilaku Organisasi*. Edisi Ke 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Mar'at. (1996). *Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama.
- Miles, M. B & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. 2<sup>nd</sup> edition. California: Sage.
- Myers, D. M., & Klein, K. H. (2011). A Set of Principles Conducting Critical Research in Information System. *MIS Quarterly*. Vol. 35 91). Pp. 17-36.
- Padmowati, Sri. (2004). *Implementasi Sistem Manajemen Daerah di Kabupaten Jepara (Hubungan Antara Variabel Pendidikan Latihan, Partisipasi Pegawai serta Kemampuan Kerja dengan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah)*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang, Nomor 5, (2008).
- Schiffman & Kanuk. (2007). [Itnasahma.blogspot.com/persepsi.html](http://Itnasahma.blogspot.com/persepsi.html). Diakses pada tanggal 02 Januari 2012.
- Sekaran, U. (2009). *Metodologi penelitian Untuk Bisnis*. Edisi keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Sobur, A. (2003). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soeratno & Arsyad, L. (2003). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Thoha, M. (2002). *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar & Aplikasinya*. Jakarta: Manajemen PT. Raja Grafindo Persada.